

PERMUKIMAN TIONGHOA DI SURAKARTA PADA TAHUN 1900-1940

RINGKASAN SKRIPSI



Oleh:

Sri Sukirni
NIM 13407144031

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

PERMUKIMAN TIONGHOA DI SURAKARTA PADA TAHUN 1900-1940

Disusun oleh:

Sri Sukirni
NIM. 13407144031

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Program

Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

Yogyakarta

Pada tanggal 14 Agustus 2017

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan

Tanda Tangan

Tanggal

Mudji Hartono, M. Hum
Ketua Penguji/Pembimbing

.....

12-09-2017

Dina Dwikurniarini, M. Hum
Sekretaris Penguji

.....

14-09-2017

Ririn Darini, M. Hum
Penguji Utama

.....

18-09-2017

Yogyakarta, 19 September 2017
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,

.....

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

PERMUKIMAN TIONGHOA DI SURAKARTA PADA TAHUN 1900-1940

Oleh:

Sri Sukirni dan Mudji Hartono, M.Hum

Abstrak

Orang Tionghoa datang ke Indonesia melalui beberapa tahap migrasi, pertama kali diawali oleh Fa Hien (seorang pendeta Budha yang berlayar menuju Sri Lanka dan terdampar di Pulau Jawa). Migrasi terbesar adalah pada masa penjajahan Belanda, etnis Tionghoa banyak didatangkan ke Indonesia sebagai buruh perkebunan. Imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu Hokkian, Hakka, Theo Chiu, dan Kanton. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui latar belakang keberadaan orang-orang Tionghoa di Surakarta, mengetahui perkembangan permukiman orang-orang Tionghoa di Surakarta serta mengetahui aktivitas orang-orang Tionghoa yang berpengaruh pada lingkungan sosial ekonominya.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis. Metode yang digunakan terdiri dari beberapa langkah. Pertama, *heuristik* yang merupakan suatu kegiatan mencari sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan data yang relevan. Kedua, *kritik* yaitu kegiatan untuk mengkaji otentitas dan kredibilitas sumber-sumber sejarah. Ketiga, *interpretasi* merupakan proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah serta mencari hal-hal yang saling berhubungan antara fakta yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi sebuah rangkaian fakta yang bermakna dan logis. Keempat, *historiografi* merupakan proses penyampaian hasil interpretasi secara kronologis dan sistematis dalam bentuk karya ilmiah.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan orang-orang Tionghoa di Surakarta berawal dari konflik internal keraton, orang-orang Tionghoa melakukan pemberontakan kepada Paku Buwono II dan VOC yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi. Pemberontakan itu menyebabkan peristiwa *geger pecinan* 1742. Setelah *geger pecinan* berakhir, orang-orang Tionghoa diijinkan tinggal di sebelah utara Sungai Pepe sekitar Pasar Gede ke timur di Ketandan hingga Limalasan, ke sebelah utara sampai Balong, ke utara lagi sampai Warungpelem. Pemerintah kolonial lebih menertibkan orang-orang Tionghoa terutama dalam hal permukiman dan juga menunjuk para pejabat Tionghoa dari kalangan mereka sendiri yang diberi pangkat *Major*, *Kapitein*, *Luitenant*, dan *Wijk Meester*. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* untuk mengawasi aktivitas sosial ekonomi orang-orang Tionghoa. Setelah *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* dihapuskan aktivitas sosial ekonomi orang Tionghoa di Surakarta semakin kompleks serta interaksi dengan orang Jawa juga semakin erat. Namun, hubungan itu mengalami ketegangan yang diawali oleh industri batik yang menyebabkan persaingan antara *Kong Sing* Tionghoa dengan *Rekso Roemekso* Jawa.

Kata kunci: Permukiman, Surakarta, Tionghoa.

I. Pendahuluan

Sejarah orang Tionghoa di Indonesia sudah cukup lama. Berbagai sumber menunjukkan bahwa orang Tionghoa hadir di Indonesia sejak abad ke-5 yaitu dengan kunjungan pendeta Fa Hien. Menjelang abad ke-19, kehadiran orang Tionghoa ke Indonesia semakin banyak, kebanyakan mereka adalah kaum laki-laki kemudian diikuti kaum perempuan.¹ Menurut catatan sejarah, keberadaan orang-orang Tionghoa di Indonesia lebih dulu dari pada orang-orang Eropa, yang ditandai oleh adanya perkampungan Tionghoa di pesisir Utara Jawa seperti Tuban, Demak, dan Jepara pada abad ke-15.²

Kehadiran para imigran Tionghoa itu berasal dari Propinsi Fujian dan Kwangtung di pantai selatan dan tenggara. Mereka adalah orang Tionghoa dari kelompok bahasa yang berbeda-beda seperti Hokkian, Hakka, Theo Chiu, Kanton, Hok Chiu, Hok Chia, Heng Hua, Hainese (Hailam). Orang-orang Heng Hua, Hok Chia, dan Hokkian disebut Minnan.³ Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Indonesia sudah beratus-ratus tahun yang lalu, Benny Juwono dalam Lembaran Sejarah menjelaskan bahwa:

Imigran Tionghoa datang ke Indonesia sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Pengaruh pemujaan roh nenek moyang dengan ajaran Konfusianisme membentuk kepercayaan komunitas ini harus memelihara kuburan orang tua atau pendahulunya. Kepercayaan ini lama-kelamaan terkikis. Tekanan ekonomi dalam negara Tiongkok telah memaksa orang Tionghoa merantau ke Asia Tenggara dari Pantai China dengan hembusan angin muson Desember-Mei menyusuri daratan Asia Tenggara. Faktor kemiskinan menjadi salah satu sebab orang Tionghoa bermigrasi ke Asia Tenggara. Di samping itu, keadaan politik dalam negeri seperti Perang Candu 1839, Pemberontakan Taiping 1851 serta krisis ekonomi yang terjadi berulang

¹ Z.M. Hidajat, *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1993), hlm. 53.

² M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 6-10. Pada tahun 414 sebenarnya telah berlangsung pelayaran yang dilakukan orang Tionghoa yaitu Fa-Hien ke Malaka. Pendeta I-Tsing pada tahun 671, Ch'ang Chun pada abad ke-7, Chia Tan pada abad ke-8, namun pelayaran-pelayaran ini baru bersifat ekspedisi belum pelayaran migrasi.

³ Pratiwo, *Arsitektur Tradisional Tionghoa dan Perkembangan Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 15.

kali seperti wabah kelaparan akibat kegagalan panen telah mendorong ribuan imigran dari China Selatan mencari pekerjaan ke luar negeri.⁴

Imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia mengelompok berdasar kesamaan suku tempat asalnya di Tiongkok. Orang-orang Hokkian adalah golongan terbesar yang bertempat tinggal di Jawa, dan Batavia sejak lama merupakan salah satu pusat permukiman Tionghoa di Jawa.⁵ Mereka datang ke Pulau Jawa sebagai pedagang yang membawa porselen dan sutra untuk ditukar dengan beras dan hasil pertanian yang lain.

Mereka datang dengan perahu yang kecil (jung) dan bergantung pada angin musim, mereka harus menunggu angin utara agar dapat pulang ke negaranya. Selama waktu menunggu di Pulau Jawa inilah mereka terpikat oleh perempuan setempat dan membentuk keluarga. Lama-kelamaan terbentuklah permukiman orang Tionghoa yang disebut dengan pecinan, yang berdampingan dengan rumah atau keraton penguasa pribumi.

Bangsa Eropa pertama datang ke Indonesia pada tahun 1595 setelah berlayar melewati Semenanjung Harapan di Afrika Selatan dengan tujuan membeli rempah-rempah dan membawanya ke Eropa, namun pada akhirnya berniat untuk menguasai wilayah tersebut. Demi menghindari persaingan di antara mereka, didirikanlah VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) pada tahun 1602. Markas VOC pertama kali didirikan di Ambon. Berhubung dengan semakin meluasnya wilayah yang dikuasai, markas VOC kemudian dipindahkan ke Jayakarta yang kemudian dinamai Batavia.⁶

Dominasi kepentingan VOC di Batavia seringkali menyebabkan konflik antara kompeni dagang Belanda itu dengan orang-orang Tionghoa. Salah satu konflik terjadi pada tahun 1740, yang dikenal dengan pembantaian masal orang

⁴ Benny Juwono, "Etnis China di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi", *Lembaran Sejarah* Vol. 2, No. 1, (Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM, 1999), hlm. 59-60.

⁵ Z.M. Hidajat, *Ibid.*

⁶ Pratiwo, *op.cit.*, hlm. 10.

Tionghoa di Batavia. Akibat peristiwa itu banyak orang-orang Tionghoa dari Batavia pindah ke beberapa wilayah di Jawa Tengah. Sementara itu, sebagian dari orang-orang Tionghoa yang mulanya akan dipulangkan ke negaranya, dalam perjalanan ternyata mereka diturunkan di Semarang. Orang-orang Tionghoa yang gagal kembali ke Tiongkok ini terpaksa tinggal di Semarang bergabung dengan masyarakat Tionghoa yang lebih dahulu bermukim di wilayah itu.

Pada waktu yang sama, di Semarang telah ada aktivitas perdagangan VOC yang dirasa mengurangi legitimasi kerajaan Mataram yang berpusat di Kartasura. Muncul perlawanan dari Paku Buwono II terhadap VOC, orang-orang Tionghoa di Semarang turut serta membantu Paku Buwono II. Sikap orang Tionghoa ini didorong keinginan untuk balas dendam pada VOC atas peristiwa pembunuhan masal di Batavia tahun 1740. Perlawanan yang dilakukan Paku Buwono II dengan orang Tionghoa ini mengalami kegagalan dan membuat mereka semakin terdesak.⁷ Sikap politik Paku Buwono II berbalik, ia menjadi akomodatif terhadap VOC. Perubahan sikap politik Paku Buwono II ini menimbulkan kekecewaan pada orang-orang Tionghoa yang telah membantunya melawan VOC. Bentuk kekecewaan orang-orang Tionghoa diluapkan dengan turut mendukung pemberontakan Raden Mas Garembi terhadap Paku Buwono II.

Serangan yang didukung oleh orang-orang Tionghoa itu berhasil menduduki Keraton Mataram di Kartasura, sehingga peristiwa ini juga dikenal dengan *geger pecinan* tahun 1742. Sebelum meletus *geger pecinan*, Paku Buwono II pada bulan November 1741 telah melakukan penyerbuan terhadap kantor VOC di Semarang dengan kekuatan 20.000 orang yang sebagian pasukannya adalah orang Tionghoa meskipun penyerbuan itu mengalami kegagalan. Pada bulan Juli di tahun yang sama, Paku Buwono II juga menumpas Garnisun VOC yang bertugas di Kartasura. Raden Mas Garembi yang memimpin penyerangan Paku Buwono II di Kartasura merupakan cucu Amangkurat III, ia diberi gelar Sunan

⁷ Alex Sudewa, *Dari Kartasura ke Surakarta*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Asia, 1995), hlm. 241.

Kuning. Nama Sunan Kuning diberikan oleh orang Tionghoa karena memimpin kaum kulit kuning atau orang Tionghoa.⁸

Didukung oleh VOC, Paku Buwono II berhasil menumpas pemberontakan dan merebut kembali Keraton Mataram, namun kerajaannya dalam kondisi yang rusak parah dan tidak mungkin untuk ditinggali kembali. Berakhirnya *geger pecinan* membuat Paku Buwono II harus memindahkan Ibu Kota Kerajaan ke Surakarta pada tahun 1745. Orang-orang Tionghoa yang turut serta melakukan pemberontakan pada Paku Buwono II tetap diizinkan tinggal di ibu kota yang baru.⁹

Permukiman Tionghoa di Surakarta pada masa awal didirikannya terletak di Kampung Balong (sebelah Utara Sungai Pepe sekitar Pasar Gede) ke Timur di Ketandan hingga Limalasan, ke sebelah utara sampai Balong, ke utara lagi sampai Warungpelem.¹⁰ Setelah terjadi perpecahan Kerajaan Surakarta tahun 1757, yang ditandai oleh Perjanjian Salatiga, sebagian Kota Surakarta menjadi bagian dari wilayah Kasunanan dan sebagian lain menjadi wilayah Mangkunegaran.¹¹ Masa kepemimpinan Paku Buwono IV (1780-1820), pemerintah kolonial Belanda menunjuk pemimpin bagi orang-orang Tionghoa yang berpangkat mayor.¹² Penunjukan ini didasari semakin banyaknya orang-orang Tionghoa di Surakarta

⁸ M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm, 140-141.

⁹ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Bagian 2 Jaringan Asia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 125.

¹⁰ R.M. Sajid, *Babad Sala*, (Surakarta: Rekso Pustoko, 2001), hlm. 61.

¹¹ Perpecahan Mataram ditandai oleh adanya Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi dua yaitu Kasultanan yang berpusat di Yogyakarta dan Kasunanan yang berpusat di Surakarta. Perpecahan Kasunanan ditandai oleh Perjanjian Salatiga tahun 1757 yang memberikan sebagian wilayah Kasunanan kepada Raden Mas Said, yang kemudian kadipaten otonom bernama Mangkunegaran. Lihat George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 1-3.

¹² R.M. Sajid, *op. cit.*, (1984), hlm. 65.

serta semakin pentingnya peran kelompok ini dalam aktivitas perekonomian. Mayor membawahi pemimpin perkampungan Tionghoa atau *wijk*, yang berpangkat kapiten. Kapiten bertanggung jawab kepada mayor Tionghoa, sedang mayor Tionghoa bertanggung jawab langsung kepada pemerintah kolonial. Penunjukan mayor dari kalangan orang-orang Tionghoa ditentukan dari jumlah kekayaan yang dimiliki, karena jumlah kekayaan identik dengan besarnya pengaruh seseorang dalam sosial politik.

Orang-orang Tionghoa di Surakarta harus mengikuti kebijakan pemerintah kolonial dan kebijakan keraton. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap orang-orang Tionghoa pada abad ke-19 adalah pembatasan terhadap gerak orang Tionghoa. Dampak dari kebijakan itu, orang Tionghoa tidak bisa tinggal pada suatu wilayah tanpa surat izin tinggal (*wijkenstelsel*) dan tidak seorang pun dapat menuju ke daerah pedalaman tanpa surat izin jalan (*passenstelsel*). Penetapan tempat tinggal dan sistem surat jalan bagi Tionghoa dilatarbelakangi oleh kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda terhadap aktivitas ekonomi orang Tionghoa yang berkembang pesat sehingga memicu peningkatan jumlah yang melampaui jumlah orang Eropa dan Timur Asing lainnya.¹³

Abad ke-19, atas desakan organisasi sosial masyarakat Tionghoa peraturan *wijkenstelsel* dihapuskan sehingga membuat orang Tionghoa mengalami penyebaran keluar dari tempat-tempat yang dikhususkan bagi mereka. Penyebaran orang-orang Tionghoa tetap berpusat di daerah yang terdapat klenteng. Selain itu *passenstelsel* juga dihapuskan yang menyebabkan aktivitas sosial ekonomi orang Tionghoa di Surakarta semakin kompleks serta interaksi dengan orang Jawa juga semakin erat. Hubungan antara orang Tionghoa dengan orang Jawa di Surakarta mengalami ketegangan diawali dengan industri batik. Para pengusaha dan pedagang batik Jawa sangat tergantung pada bahan-bahan batik yang dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Salah satu konflik terjadi pada tahun 1911 ketika

¹³ Sariyatun, *Usaha Batik Cina di Vorstenlanden Surakarta Awal Abad XX*, (Surakarta: UNS Press, 2005), hlm. 43.

terjadi bentrokan kelompok Tionghoa dan Jawa yang disebabkan persaingan *Kong Sing* Tionghoa dengan pedagang batik pribumi muslim yang membentuk *Rekso Roemekso* (saling menjaga). Paguyuban ini menjadi cikal bakal berdirinya Sarekat Dagang Islam tahun 1909 di Surakarta yang memberi fasilitas serta perlindungan pedagang muslim Jawa untuk menghadapi pedagang Tionghoa.

II. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian sejarah sebagai sarana untuk menelaah literatur yang baik yang dilandasi oleh pemikiran dan penelitian. Kajian pustaka dapat menambah informasi dan data-data yang dibutuhkan dan yang mendukung untuk melakukan penelitian sejarah. Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.¹⁴ Kajian pustaka sangatlah diperlukan dalam sebuah penelitian, karena dapat menambah informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam proses penulisan.¹⁵

Pustaka Benny Juwono yang berjudul *Etnis Cina di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi*. Migrasi orang Tionghoa ke kawasan Asia Tenggara dilakukan oleh suku bangsa Tiongkok bagian selatan. Secara umum imigran Tionghoa pada abad 19 di Muangthai, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Hindia Belanda tergolong miskin, baik secara individu maupun kelompok. Kemiskinan imigran Tionghoa tampak dari pekerjaan mereka yang tergolong kasar yaitu sebagai buruh, kuli perkebunan atau pedagang kecil. Modernisasi Kota Surakarta, khususnya sejak pemerintahan Paku Buwana X (1893-1939), tampak dari sarana perkotaan seperti kereta api, jaringan telepon pasar, dan transportasi darat. Hal tersebut menjadi kebutuhan pokok Kota Surakarta bersamaan dengan itu muncul bangunan yang dikembangkan imigran asing dengan seni arsitektur

¹⁴ Tim Kaprodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hlm. 6.

¹⁵ Suhartono, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 156.

yang khas. Imigran Tionghoa menempati sebagian wilayah kota yang tampak melalui pertokoan milik orang Tionghoa yang terkadang juga berfungsi sebagai tempat tinggal. Pada bagian tengah kota Surakarta banyak ditempati beberapa etnis seperti etnis Jawa, Eropa, Tionghoa dan Arab.

Perkampungan orang-orang Eropa terletak di sekitar rumah residen, perkantoran, gereja, gedung pertunjukan, toko-toko, gedung-gedung sekolah, dan Benteng Vastenburg. Perkampungan Eropa di luar benteng itu yang disebut Loji Wetan karena bangunannya berbentuk loji yang menggunakan bahan batu bata. Apabila perkampungan orang Eropa terpisah dari perkampungan etnis lain berdasarkan diskriminasi ras, maka penentuan letak perkampungan pecinan untuk orang-orang Tionghoa terletak di sekitar Pasar Gedhe yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan terhadap gerak-gerik orang Tionghoa.

Etnis Tionghoa masuk ke Indonesia melalui beberapa tahap migrasi, pertama kali diawali oleh Fa Hien, seorang pendeta Budha yang hendak berlayar menuju Sri Lanka dan terdampar di Pulau Jawa. Migrasi terbesar adalah di saat masa penjajahan Belanda, etnis Tionghoa banyak didatangkan ke Indonesia sebagai buruh perkebunan. Banyaknya etnis Tionghoa yang masuk Indonesia menyebabkan ledakan penduduk. Meledaknya populasi Tionghoa di Batavia memaksa pemerintah kolonial mengurangi populasi etnis Tionghoa dengan memulangkan etnis Tionghoa ke negara asalnya, namun mereka berhasil melarikan diri dan menyebar di daerah dan kota di Jawa. Etnis Tionghoa masuk dan berkembang di Surakarta pada masa Kerajaan Mataram di bawah Paku Buwono II. Mereka bergabung dengan pasukan kuning, pelarian Tionghoa dari Batavia yang menyerbu Mataram dan menyebabkan *geger pecinan*. Peristiwa itu menyebabkan Paku Buwono memindahkan kerajaan dari Kartasura ke Surakarta.

Penduduk Surakarta dapat dikatakan homogen, artinya masing-masing etnis terkumpul dan menempati daerah-daerah tertentu secara terpisah dengan etnis lainnya. Beberapa etnis yang mendiami di seputar wilayah ibukota kerajaan yaitu Jawa, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Luas Kota Surakarta 24 km² dengan ukuran panjang 6 km, membentang dari arah barat ke timur, dan 4 km dari arah

utara ke selatan. Kota ini terletak pada ketinggian 200 m di atas permukaan laut, di sebelah kiri Bengawan Solo, dan pada kedua sisi Sungai Pepe.

Sebagian besar kota tersebut masuk wilayah kasunanan dan hanya seperlima saja yaitu di sebelah barat laut, masuk Kadipaten Mangkunegaran.¹⁶ Meskipun daerah milik kasunanan ini terbentang di seluruh kota, selain bagian barat laut, namun di kalangan penduduk daerah kasunanan itu dikenal dengan nama Kidulan. Sebutan ini dihubungkan dengan letak keraton yang terdapat di sebelah selatan, sedang istana Mangkunegaran di sebelah utara. Jalan Raya Purwasari (sekarang Jl. Slamet Riyadi) dan jalan trem yang menghubungkan Boyolali dan Wonogiri seakan-akan menjadi batas yang memisahkan kedua daerah itu.¹⁷

Di sebelah utara keraton terletak kepatihan, tempat kediaman pepatih dalem, sekaligus berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan. Istana Mangkunegaran terletak di sebelah selatan Sungai Pepe, demikian pula perkampungan orang-orang Eropa yang meliputi rumah residen, kantor-kantor, gereja, gedung pertunjukan, gedung-gedung sekolah, toko-toko, dan Benteng Vastenburg sebagai pusatnya.

Letak keraton Istana Mangkunegaran, rumah residen, dan kepatihan tidak berjauhan. Benteng Vastenburg dibangun dekat dengan keraton dan rumah residen. Meski jarak antara keraton dan istana Mangkunegaran yang menghadap ke selatan tidak berjauhan, namun letaknya diatur agar keduanya dipisahkan oleh suatu jalan raya. Selain juga dapat dilihat bahwa jarak dari kepatihan ke rumah residen lebih dekat daripada jarak dari kepatihan ke keraton, dan untuk mencapai keraton, pepatih dalem harus melewati rumah residen.

Pengaturan tempat-tempat itu adalah untuk kepentingan dan keamanan pemerintah kolonial Belanda di Surakarta. Jika perkampungan orang Eropa terpisah dari perkampungan etnis lain berdasarkan diskriminasi ras, maka

¹⁶ Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*, (Yogyakarta: Taman Siswa, 1989), hlm. 2.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

penunjukan kampung pecinan untuk orang-orang Tionghoa ditujukan agar gerak-gerik mereka mudah diawasi.¹⁸ Pecinan terletak di sekitar Pasar Gede, diurus oleh kepalanya yang diambil dari etnis yang sama, dan diberi pangkat mayor. Di kalangan penduduk kepala etnis ini dikenal dengan nama Babah Mayor.

Buku “Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo” karya Ayu Windy Kinasih menjelaskan bahwa kebijakan pemukiman di Surakarta dilakukan dengan penunjukkan daerah-daerah tertentu yang bisa dihuni oleh etnis Tionghoa. Kampung pecinan di Surakarta adalah Balong dan disekitar Pasar Gede, yang mana setiap warga kampung tersebut hanya boleh bergaul dalam lingkungan mereka sendiri. Orang Tionghoa diharuskan melakukan adat-istiadat mereka sendiri sehingga identitas mereka akan tetap berbeda dengan penduduk lain di luar kampung pecinan. Orang Tionghoa ditempatkan sebagai kasta kedua di bawah golongan Eropa dan di atas golongan pribumi.

Pustaka lain yang digunakan yaitu karya George D. Larson berjudul “*Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*”. Buku ini menjelaskan perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, politik yang ada di Surakarta. Buku itu juga menyebutkan bahwa etnis Tionghoa berhasil menguasai perekonomian di Surakarta termasuk perusahaan-perusahaan batik. Orang-orang Tionghoa mendirikan organisasi bernama *Kong Sing*, sehingga pedagang batik Jawa di Surakarta yang diprakarsai oleh Haji Samanhudi membentuk *Rekso Roemekso* yang menjadi cikal berdirinya SDI (Sarekat Dagang Islam) dan diubah menjadi SI (Sarekat Islam) pada tahun 1911 untuk melawan praktek curang dari pengusaha Tionghoa.

III. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian historis. Metode historis merupakan salah satu penyelidikan mengaplikasi metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis suatu masalah. Metode penelitian skripsi ini meliputi:

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

1. Heuristik

Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah.¹⁹ Heuristik dilakukan untuk menghimpun jejak-jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui peristiwa-peristiwa bersejarah masa lampau. Penulis mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik ini baik sumber primer maupun sumber sekunder. Langkah awal dari tahapan ini penulis terlebih dahulu menentukan topik dan judul skripsi serta pengumpulan sumber sejarah atau data-data yang mendukung dan didapat dari berbagai perpustakaan, instansi pemerintah dan perorangan. Pengumpulan bahan dalam skripsi ini antara lain dari Perpustakaan UNY, Perpustakaan UGM, Perpustakaan UNS, Perpustakaan Monumen Pers, Perpustakaan Kota Surakarta, Perpustakaan Rekso Pustoko.

a. Sumber primer

Regeering Almanak 1908

Staatblad van Nederlandsch Indie, 1835, No. 37

Staatblad van Nederlandsch Indie, 1891, No. 214

Volkstelling, 1930.

b. Sumber sekunder

Ayu Windy Kinasih, *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*, Yogyakarta: Fisipol UGM, 2005.

Benny Juwono, "Etnis China di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi", *Lembaran Sejarah* Vol. 2, No. 1, Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM, 1999.

Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*, Yogyakarta: Taman Siswa, 1989.

Dwi Ratna Nurhajarini, dkk., *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*, Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional

¹⁹ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 67.

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.

Larson, George D., *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1990.

2. Verifikasi

Verifikasi atau kritik sumber merupakan suatu pengujian sumber dan menganalisis secara kritis mengenai keotentikan sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Kritik sumber ada dua macam yaitu kritik eksternal (otentisitas) dan kritik internal (kredibilitas).²⁰ Kritik sumber ekstern merupakan kritik sumber sejarah dari luar misalnya mengenai keaslian dari kertas yang dipakai, ejaan, tinta, gaya, tulisan, dan semua penampilan luarnya untuk mengetahui keotentikannya.

3. Interpretasi

Interpretasi yaitu merangkai fakta-fakta yang telah ditemukan dan ditetapkan melalui kritik sumber ekstern maupun intern agar menjadi sebuah makna yang saling berhubungan. Fakta-fakta tersebut dirangkai, dikaitkan dengan fakta lain, agar terlihat sebagai rangkaian fakta yang masuk akal, dan menunjukkan sebuah arti dan kecocokan satu sama lainnya.

4. Historiografi

Secara harfiah, historiografi berarti pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu yang disebut sejarah. Sejarah sebagai pengetahuan tentang masa lalu diperoleh melalui sistem penelitian mengenai kenyataan masa lalu dengan metode ilmiah yang sah.²¹ Rekonstruksi rekaman dan peninggalan masa lampau secara kritis dan imajinatif berdasarkan bukti-bukti atau data-data yang diperoleh melalui proses itu disebut historiografi.

²⁰ R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 246.

²¹ Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 16.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Etnis Tionghoa di Surakarta

A. Orang-Orang Tionghoa di Surakarta

Orang Tionghoa di Indonesia bukanlah masyarakat baru. Kehadiran orang Tionghoa di Indonesia khususnya di Jawa sudah ada sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Orang-orang Tionghoa memiliki sejarah panjang dalam mengintegrasikan diri mereka ke dalam masyarakat Asia Tenggara, terutama Indonesia. Kehadiran orang-orang Tionghoa ke Indonesia sudah berlangsung sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Secara historis hal ini dapat diketahui lewat kedatangannya Fa Hien, seorang pendeta agama Budha dari Tiongkok yang datang ke Indonesia dan singgah di Pulau Jawa pada abad ke-4 dan I-Tsing pada abad ke-7.²²

Pada masa Dinasti Tang (618-907 M),²³ daerah selatan Tiongkok merupakan daerah yang ramai dalam bidang perdagangan, dari tempat tersebut timbul keinginan untuk memperluas perdagangan mereka dengan melakukan pelayaran. Perjalanan perdagangan yang membutuhkan waktu cukup lama membuat orang Tionghoa sering bersinggah dan menetap di wilayah Laut Cina Selatan. Pada masa Dinasti Tang inilah orang-orang Tionghoa mulai berdatangan ke Indonesia, puncaknya pada abad ke-19 dan awal abad-20 merupakan migrasi besar-besaran bagi orang-orang Tionghoa ke seluruh dunia.²⁴

Secara umum orang-orang Tionghoa bermigrasi secara individu maupun kelompok kecil kurang dari lima orang. Imigran-imigran ini tergolong Tionghoa

²² Nuraini Soyomukti, *Soekarno dan Cina*, (Yogyakarta: Garasi, 2012), hlm. 160.

²³ Dinasti Tang adalah salah satu dinasti yang paling berpengaruh di Tiongkok, pada masa ini terjadi migrasi secara besar-besaran. Kaisar Dinasti Tang melarang rakyatnya meninggalkan Tiongkok pergi merantau ke negeri asing. Tetapi meskipun dilarang, banyak orang-orang Tionghoa pergi ke luar negeri. Lihat Sie Tjoen Lay, dkk, *Di Sekitar Sedjarah Indonesia-Tiongkok*, (Bandung: KPPK Balai Pendidikan Guru, t.t), hlm. 20.

²⁴ Victor Purcell, *The Chinese in South East Asia*, (London: Oxford University Press, 1981), hlm. 465.

miskin di negaranya, kemiskinan tampak dari pekerjaan mereka yang kasar seperti buruh, kuli perkebunan atau pedagang kecil. Para pendatang dari Tiongkok ini kemudian melakukan perkawinan campuran dan asimilasi dengan pribumi, hal ini dikarenakan wanita Tionghoa hampir tidak ada yang keluar dari Tiongkok sebelum abad ini.

Sistem ekonomi liberal yang diterapkan oleh pemerintah kolonial di Indonesia menyebabkan modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah mendirikan berbagai perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang besar di Deli, Sumatera Timur. Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini memungkinkan harus mendatangkan tenaga kerja orang-orang Tionghoa, karena memang sulit untuk mempekerjakan penduduk setempat. Pada masa liberal ini, jumlah penduduk Tionghoa di Indonesia semakin meningkat terutama di Pulau Jawa.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Tionghoa di Berbagai Daerah di Jawa Tahun 1815

Daerah	Jumlah Seluruh Penduduk	Jumlah Seluruh Penduduk Tionghoa	Prosentase
Banten	231.604	628	0.27
Batavia	332.015	52.394	15.78
Bogor	76.312	2.633	3.45
Cirebon	216.001	2.343	1.08
Tegal	178.415	2.004	1.12
Pekalongan	115.442	2.046	1.77
Semarang	327.610	1.700	0.15
Jepara & Juana	103.290	2.290	2.21
Rembang	158.530	3.891	2.45
Gresik	115.442	364	0.31
Surabaya	154.512	2.047	1.32.
Pasuruan	108.812	1.070	0.98
Prabalingga	104.359	1.430	1.37
Surakarta	972.727	2.435	0.25
Yogyakarta	685.207	2.202	0.32

Sumber: Handinoto, *Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa pada Masa Kolonial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 37.

Kedatangan etnis Tionghoa di Surakarta berawal dari konflik internal Keraton Surakarta. Keberpihakan Sunan Paku Buwono II terhadap VOC mengecewakan para pembesar keraton lainnya. Pangeran Tepasana dieksekusi karena tuduhan memberontak melawan sunan. Raden Mas Garendi (putra Pangeran Mangkunegoro), adik Paku Buwono II bersama Pangeran Wiramenggala melarikan diri menuju Semarang. Mereka ditahan oleh pasukan Tionghoa ketika tiba di dekat Terboyo, kemudian Raden Mas Garendi tinggal bersama Tan Sin Ko atau Singseh.²⁵ Raden Mas Garendi berniat untuk melakukan pemberontakan terhadap VOC dan juga keraton.

Pemberontakan Raden Mas Garendi banyak dibantu oleh pasukan Tionghoa (pasukan kuning) yang datang dari Semarang. Pasukan Tionghoa ini adalah orang-orang Batavia yang hendak dipulangkan ke Tiongkok karena tingginya populasi Tionghoa di Batavia. Meningkatnya populasi Tionghoa di Batavia telah menyebabkan kota menjadi kumuh karena tingkat pengangguran yang tinggi. Populasi yang tinggi ini menyebabkan munculnya gerombolan-gerombolan di kalangan etnis Tionghoa. Batavia menjadi tidak aman dan seringkali terjadi kerusuhan. Peristiwa ini berujung pada pembantaian terhadap etnis Tionghoa pada tahun 1740.²⁶ Sebagian yang selamat diangkut ke kapal-kapal menuju ke Ceylon (Sri Lanka) dan Afrika Selatan, namun dalam perjalanan mereka diturunkan di Semarang dan banyak yang dibuang di laut.²⁷ Sedikit dari mereka yang tersisa dan sempat melarikan diri dan menjadi pasukan kuning. Pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Garendi dan pasukan Tionghoa menyebabkan peristiwa yang dikenal dengan nama *geger pecinan* atau disebut dengan Bedah Kartasura, aksi perusakan oleh pasukan Tionghoa.

²⁵ Ayu Windy Kinasih, *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2005), hlm. 87.

²⁶ Pembantaian di Batavia berlangsung selama tiga hari yaitu pada tanggal 8-10 Oktober dan menyebabkan sekitar 10.000 orang Tionghoa meninggal dalam peristiwa tersebut. Lihat Colin Brown, *A Short History of Indonesia*, (Singapore: South Wind Productions, 2003), hlm. 61.

²⁷ Djakariah, *Sejarah Indonesia II*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 114.

Orang-orang Tionghoa diijinkan bermukim di Kota Surakarta sebagai ibukota baru yang dipindahkan dari pusat pemerintahan lama Kartasura. Mereka diberi tempat oleh sunan untuk tinggal di sebelah utara Sungai Pepe sekitar Pasar Gede²⁸ ke timur di Ketandan hingga Limalasan, ke utara sampai di Balong. permukiman Tionghoa terletak di timur laut keraton atau sebelah utara permukiman orang-orang Eropa. Selain itu mereka juga diijinkan untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi.

Penunjukan tempat-tempat orang Tionghoa di lokasi yang terletak di sentra aktivitas tersebut bisa dikaitkan dengan kepentingan penguasa pribumi untuk mengembangkan sistem ekonomi swadaya. Pada saat itu Sungai Pepe masih digunakan sebagai sarana perdagangan dengan perahu-perahu sungai yang membawa barang dagangan dari daerah arus Sungai Bengawan Solo dari Gresik, Tuban ke Ngawi, Madiun dan Surakarta untuk kemudian dibongkar dan dibawa ke Pasar Gede.²⁹

Secara fisik orang-orang Tionghoa terlihat sama dan mudah untuk dibedakan dari etnis lain, namun sebenarnya orang-orang Tionghoa di Surakarta terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki perbedaan. Para imigran Tionghoa kebanyakan berasal dari Propinsi Fukien dan Kwangtung di Pantai Selatan dan Tenggara yang merupakan daerah padat penduduk. Mereka membawa kebudayaan suku bangsanya sendiri-sendiri bersamaan dengan perbedaan bahasanya. Ada empat suku bangsa Tionghoa di Indonesia yaitu Hokkian, Hakka, Theo Chiu, dan Kanton.³⁰

Orang-orang Tionghoa dari suku Hokkian jumlahnya paling besar dibandingkan dengan suku bangsa lainnya. Di antaranya, 45% orang Hokkian (554.981 jiwa), 16% orang Hakka (200.736 jiwa), 11% orang Kanton (136.130

²⁸ Lihat R.M. Ng. Tiknopranoto dan R. Mardisuwignyo, *Sejarah Kutha Sala: Kraton Sala, Bengawan Sala, Gunung Lawu*, (Sala: Toko Buku Pelajar, 1980), hlm. 52

²⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 88.

jiwa), 7% orang Theo Chiu (87.812 jiwa), dan sisanya terdiri dari beberapa suku bangsa lain yang masing-masing jumlahnya tidak sangat banyak. Kecuali orang Hokkian, sebagian besar orang Tionghoa berada di luar Pulau Jawa dan Madura.

B. Golongan *Totok* dan Peranakan

Masyarakat Tionghoa di Surakarta juga seperti yang tinggal di kota-kota lain, golongan Tionghoa dibagi menjadi dua golongan yaitu *totok* dan peranakan. Yusiu Liem mengatakan bahwa Tionghoa *totok* disebut juga *sing-kek* (pendatang baru) yaitu orang-orang Tionghoa sebagai migran ke Indonesia.³¹ Tionghoa *totok* masih memegang teguh kebudayaan dan adat-istiadat leluhurnya, dan menggunakan bahasa Tionghoa.³² Hal itu disebabkan karena mereka masih menggunakan bahasa asli sebagai bahasa ibu di lingkungan keluarga dan sesama orang Tionghoa yang satu suku. Masyarakat Tionghoa *totok* masih tetap mempertahankan keyakinannya pada kepercayaan tradisionalnya yaitu Taoisme, Konfusianisme, dan Budhisme. Ketiga kepercayaan ini disebut *Sam-Kao* (tiga agama).³³

Ada tanda fisik yang menunjukkan golongan Tionghoa *totok* laki-laki pada masa itu, yaitu masih menggunakan dan memelihara kuncir panjang yang dikepang rapi dan dililit dengan pita merah. Ketampanan laki-laki Tionghoa ditentukan oleh panjang rambutnya.³⁴ Pakaian yang mereka kenakan adalah baju panjang dengan lengan lebar dan celana panjang longgar yang biasanya berwarna hitam atau gelap. Baju itu panjang seperti rok perempuan dan tertutup rapat di leher.

³¹ Yusiu Liem, *Prasangka terhadap Orang-Orang Cina*, (Jakarta: Jambatan, 2000), hlm. 10.

³² Rustopo, *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta (1895-1998)*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 68.

³³ Yusiu Liem, *Ibid.*

³⁴ Frieda Amran, *Batavia: Kisah Kapten Woodes Rogers dan Dr. Strechler*, (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 63.

Perempuan Tionghoa *totok* memakai pakaian *pekki* yang terdiri dari baju kurung panjang, celana longgar, dan berselop. Kaki perempuan *totok* biasanya kecil, sebab sudah menjadi tradisi bagi mereka, kaki bayi perempuan dimasukkan dalam bambu. Keluarga Tionghoa *totok* sangat memperhatikan pendidikan budaya leluhur, sehingga mereka lebih suka memasukkan anak-anak mereka ke sekolah khusus Tionghoa. Diharapkan anak-anak mereka tidak akan terpengaruh adat dan budaya masyarakat setempat.

Sedangkan peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan umumnya sudah berbaur.³⁵ Menurut kenyataannya yang disebut peranakan adalah pertama, mereka yang dilahirkan dari seorang ibu dan ayah dari Tionghok dan lahir di Hindia Belanda. Dalam ketentuan hukum kolonial Belanda, mereka masuk sebagai *Onderdaan* Belanda (kawula Belanda). Kedua, mereka yang lahir dari perkawinan campuran yaitu laki-laki Tionghoa dan wanita pribumi. Ketiga, mereka yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara ayah pribumi dan ibu Tionghoa, dan karena pengaruh keadaan sosial dan ekonomi diberi nama keluarga (She) dan mendapat pendidikan di dalam lingkungan Tionghoa. Dapat disimpulkan bahwa peranakan yaitu orang-orang Tionghoa yang hidup beberapa generasi di Indonesia dan menikah dengan orang pribumi.

Peranakan sudah lama tinggal di Indonesia, sudah berbaur dengan masyarakat pribumi, berbahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat, dan berperilaku seperti pribumi. Golongan peranakan di Surakarta tinggal di perkampungan-perkampungan dalam kota. Mereka hidup berdampingan dengan kelompok pribumi Jawa dan menjalin hubungan yang baik dalam kehidupan sosial mereka, karena mereka menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, maka orang Tionghoa peranakan tersebut banyak yang mengikuti organisasi masyarakat sekitar, terutama dengan orang pribumi.

³⁵ Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002), hlm. 17.

2. Permukiman Tionghoa di Surakarta pada Masa Kolonial

A. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, orang Tionghoa bersama orang-orang Arab secara hukum digolongkan sebagai orang Timur Asing dengan implikasi bahwa hukum yang diberlakukan bukan hukum Belanda atau hukum adat yang berlaku dalam hukum pribumi. Dampaknya adalah bahwa orang-orang Tionghoa tidak tergolong sebagai orang Belanda dan tidak tergolong pula sebagai orang pribumi. Orang-orang Tionghoa adalah orang Asing dari Timur. Aturan pemerintah Hindia Belanda dengan tegas membagi status sosial warga negara menjadi tiga golongan yaitu sebagai berikut:

1. Bangsa kulit putih (orang-orang Eropa) yang diberi hak dan perlakuan yang paling baik.
2. Bangsa asing kulit berwarna (Timur Asing), mendapatkan kedudukan tingkat dua.
3. Bangsa pribumi yang menduduki tingkat sosial paling rendah.³⁶

Status orang Tionghoa yang diatur oleh pemerintah Hindia Belanda dapat dilihat pada penetapan surat izin tinggal (*wijkenstelsel*) dan dalam hal penetapan surat izin jalan (*passenstelsel*), Undang-Undang Agraria yang sengaja diciptakan untuk mempertajam perbedaan antar golongan masyarakat Hindia Belanda.

1. *Wijkenstelsel*

Wijk artinya kampung atau permukiman tertentu dalam kota besar atau kecil, sehingga *wijkenstelsel* berarti sistem perkampungan.³⁷ Di Surakarta sistem perkampungan pada masa kolonial ini dapat dilihat dengan adanya pecinan. Setiap kota besar mempunyai kampung pecinan sendiri, yaitu bagian kota-kota tua yang hampir seluruhnya terdiri dari rumah-rumah toko. Kebijakan kolonial Belanda dengan *wijkenstelsel* diterapkan sejak tahun 1834 yang mengharuskan orang-

³⁶ W. D. Soekisman, *Masalah Cina di Indonesia*, (Jakarta: Bangun Indah, 1975), hlm. 38.

³⁷ Windi Astuti, *Peran Etnis Cina di Indonesia*, (Jakarta: Bangun Indah, 2002), hlm. 70.

orang Tionghoa untuk tinggal pada zona khusus di daerah-daerah perkotaan yang ditujukan bagi mereka.

2. *Passenstelsel*

Pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan tentang peraturan surat izin jalan (*passenstelsel*). *Passenstelsel* membawa orang-orang Tionghoa menuju ke arah kebangkrutan, karena modal tidak dapat berputar dengan lancar, begitu juga dengan para pedagang Eropa karena barang-barangnya tidak dapat didistribusikan. *Passenstelsel* atau sistem surat jalan adalah peraturan yang mengharuskan orang-orang Timur Asing, terutama orang-orang Tionghoa untuk memiliki surat ijin bepergian atau melakukan usaha perdagangannya. Sistem *passenstelsel* ini dikenakan kepada orang-orang Timur Asing yang melakukan perjalanan keluar daerah atau keluar kota tempat mereka bermukim. Sistem ini merupakan kelanjutan dari kebijakan *wijkenstelsel*.

Ketentuan tersebut di atas masih ditambah lagi dengan diundangkannya *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) tahun 1870. Undang-Undang itu berisi tentang sistem penguasaan tanah, pembatasan kepemilikan tanah di pedesaan oleh orang-orang Tionghoa dan orang asing lainnya. Dengan adanya peraturan ini jumlah tanah yang dimiliki para tuan tanah Tionghoa berkurang, jumlah orang-orang Tionghoa yang hidup di pedesaan berkurang karena mereka pindah ke kota-kota besar.³⁸

Peraturan lain bagi orang-orang Tionghoa yaitu diberlakukannya peradilan *politierol*, yaitu sebuah peradilan polisi yang mana kepala polisi yang bertindak sebagai hakim. Sistem peradilan ini seringkali menjadi ajang pemerasan dan praktik ketidakadilan. Kepala polisi bisa saja memberi keputusan hukuman tanpa harus mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Sistem lainnya yaitu *Landraad* dan *Raad van Justitie*. Sistem *Landraad* adalah dewan pengadilan yang diketuai oleh seorang ahli hukum Belanda dengan seorang jaksa pegawai pencatat dan penasehat Tionghoa. Peradilan *Landraad* hanya digunakan untuk mengadili orang-

³⁸ Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2014), hlm. 270.

orang pribumi, namun banyak kasus pelanggaran yang dilakukan orang Tionghoa diadili pada peradilan ini. Peradilan *Raad van Justitie* adalah pengadilan tingkat tinggi khusus orang Eropa. Peradilan ini benar-benar berhadapan dengan seorang ahli hukum dan prosedurnya pun sesuai dengan hukum. Orang-orang Tionghoa yang diajukan pada peradilan ini biasanya melakukan pelanggaran besar atau kriminal.

Sistem peradilan dan peraturan yang diskriminatif bagi orang-orang Tionghoa telah membentuk rasa nasionalisme di kalangan orang-orang Tionghoa. Pemerintah Belanda mulai melonggarkan pembatasan terhadap orang Tionghoa dengan imbalan gerakan nasionalisme di kalangan orang Tionghoa harus dikekang. Dengan Undang-Undang tahun 1907 orang-orang Tionghoa dapat memperoleh status Eropa dengan persyaratan khusus. Penduduk Tionghoa yang bertambah setiap tahun, baik karena kelahiran maupun pendatang baru yang masuk ke Surakarta, wilayah pecinan menjadi semakin padat dan mengakibatkan wilayah ini mengalami perluasan ke arah timur dan selatan. Hal itu juga disebabkan oleh penghapusan *wijkenstelsel*, banyak orang Tionghoa mulai keluar dari wilayah ini dan hidup memencar.

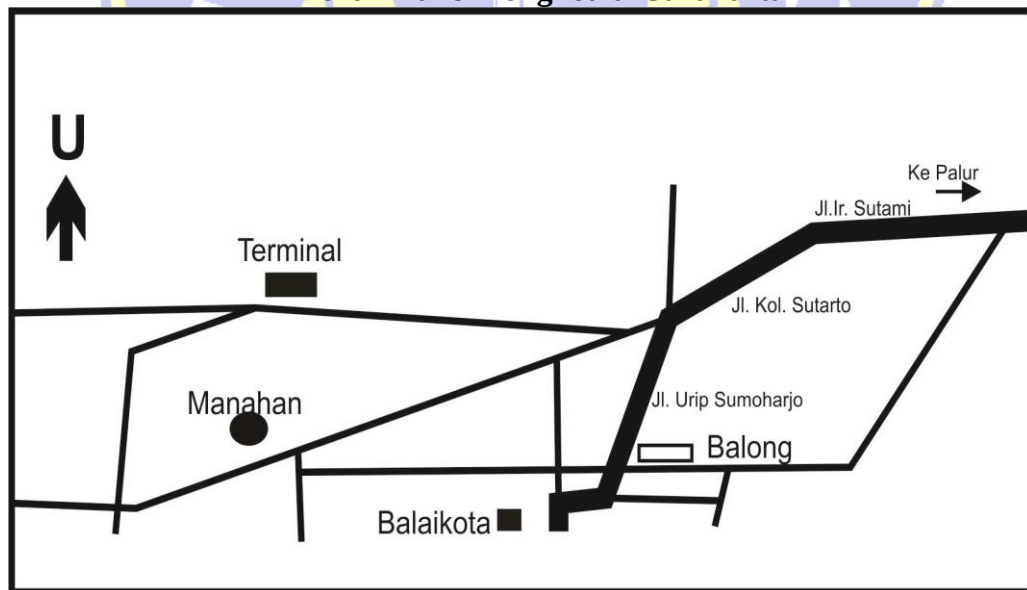
B. Pola dan Penyebaran Permukiman Tionghoa

Permukiman etnis Tionghoa di Surakarta terbentuk akibat aktivitas perdagangan dengan berbagai elemen penting yang terdapat di permukiman tersebut. Model permukiman orang-orang Tionghoa, terutama di Surakarta berorientasi pada empat elemen utama yaitu klenteng, pasar, akses dan jalan. Aktivitas sosial dan keagamaan antar etnis Tionghoa dilakukan di klenteng sebagai elemen pengikat etnisitas. Pasar sebagai aktivitas sosial ekonomi, sedangkan akses transportasi serta jalan adalah penunjang bagi ruang gerak etnis Tionghoa.³⁹ Letak permukiman strategis di sepanjang jalan utama Kota Surakarta dan dekat dengan pasar menyebabkan aktivitas ekonomi etnis Tionghoa menjadi maju.

³⁹ Lihat <https://phesolo.wordpress.com/2012/02/25/pemukiman-tionghoa-di-surakarta-masa-kolonial/> (Diakses pada tanggal 28 April 2017, pukul 17:25).

Surakarta terdapat daerah permukiman etnis Tionghoa yaitu daerah Pasar Gede tepatnya di Kampung Balong. Kampung Balong didirikan pada masa pemerintahan Paku Buwono X yang diperuntukkan bagi para buruh lepas yang umumnya berasal dari luar Kota Surakarta. Sesuatu yang menarik dari Kampung Balong yaitu meskipun sebagai pecinan namun yang diberikan izin di wilayah itu bukan hanya orang Tionghoa melainkan juga orang Jawa. Balong hanya merupakan satu di antara pecinan di Surakarta. Kampung Balong terletak di sebelah utara Keraton Surakarta dan juga di sebelah utara permukiman orang-orang Eropa di Loji Wetan. Kampung Balong merupakan pusat kebudayaan Tionghoa karena adanya klenteng yang dipersepsikan sebagai pusat kebudayaan bagi orang-orang Tionghoa.

Gambar 1
Denah Etnis Tionghoa di Surakarta



Masa itu Balong merupakan pusat kebudayaan Tionghoa di Surakarta, namun di tempat itu hubungan Tionghoa dengan Jawa berlangsung dengan baik. Kondisi demikian tidak dijumpai dari permukiman yang lain meskipun terletak di sekitar Kampung Balong. Balong menjadi kampung yang memiliki pembaruan yang paling baik, dikarenakan seimbangannya komposisi Tionghoa dan Jawa serta kualitas ekonomi yang rata-rata miskin sehingga mudah melakukan pembauran.

Permukiman orang Tionghoa di Kampung Balong berbentuk rumah *kong*, yaitu rumah besar dengan banyak kamar yang di dalamnya dihuni oleh satu keluarga besar dan biasanya menggunakan identitas marga yang sama. Rumah *kong* sengaja dibangun untuk menyediakan anggota keluarga dan keturunan yang tidak berhasil dalam kehidupan ekonominya agar tetap tinggal di rumah *kong*. Bagi anggota keluarga yang berhasil dalam kehidupan ekonomi memilih keluar dari rumah *kong* dan mendirikan keluarga sendiri.

Orang-orang Tionghoa golongan pedagang dan menengah ke atas diberi tempat di sekitar Pasar Gede, yang sekarang disebut Ketandan, Limalasan, di sekitar Jalan Balong (Jl. Kapten Mulyadi) dan Warung Pelem.⁴⁰ Sedangkan orang-orang Tionghoa yang belum sukses, lebih banyak campur dengan golongan pribumi (Jawa) yang berdiam di tengah-tengah kampung, yang dulunya merupakan daerah kumuh, kebun-kebun liar dan kuburan. Kampung Balong ini berkembang menjadi daerah yang tidak teratur dan terlihat kumuh. Penghuni daerah ini merupakan kelas pendatang dan pada perkembangannya termasuk dalam golongan kelas menengah ke bawah. Sampai saat ini, daerah permukiman ini dihuni oleh penduduk dari kelas sosial menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan menengah dan berkembang menjadi daerah yang padat.

3. Aktivitas Etnis Tionghoa di Surakarta

A. Bidang Sosial

Aktivitas sosial orang-orang Tionghoa di Surakarta dilakukan untuk menjaga kelangsungan mereka di tengah kelompok sosial lainnya. Orang-orang Tionghoa beradaptasi dengan penduduk pribumi melalui beberapa saluran antara lain sistem sosial dan kekerabatan yang dianut, agama, organisasi dan perhimpunan Tionghoa, dan pendidikan.

Sistem kekerabatan yang dianut yaitu bilineal, merupakan keluarga dari pihak ayah dan ibu adalah kerabat. Sistem kekerabatan ini berpengaruh pada sistem ahli waris yang dianut oleh orang Tionghoa di Surakarta yang mana

⁴⁰ R.M. Sajid, *Ibid.*, hlm. 61.

warisan tetap lebih mengutamakan patrilineal. Orang-orang Tionghoa di Surakarta pada abad ke-20 telah mengalami akulturasi adat, budaya, serta agama meskipun ada di antara mereka yang masih tetap mempertahankan keyakinan pada tanah leluhur. Umumnya orang-orang Tionghoa dianggap sebagai pemeluk agama Budha. Hal ini dikarenakan bentuk-bentuk peribadatan yang mereka lakukan ada semacam kesamaan dan keawaman masyarakat tentang agama dan kepercayaan yang dianut orang Tionghoa di Surakarta.

Pada tahun 1920, orang-orang Tionghoa mendirikan berbagai organisasi yang mengurus kegiatan sosial, olahraga, seni dan budaya, ekonomi, dan juga perkumpulan pemuda maupun kematian. Mengenai pendidikan awalnya kurang diperhatikan karena rata-rata keadaan sosial ekonomi mereka belum mapan. Sebelum abad ke-20 model pendidikan Tionghoa yang ada di Indonesia adalah pendidikan tradisional yaitu suatu sistem pendidikan yang diberikan oleh generasi yang lebih tua kepada generasi muda berdasarkan ajaran atau pengalaman-pengalaman nenek moyangnya.

B. Bidang Ekonomi

Aktivitas ekonomi orang-orang Tionghoa sejak awal sudah menjalin hubungan dengan orang Jawa. sejak tahun 1890-an orang-orang Tionghoa berperan dalam industri batik, yang semula hanya berkembang di lingkungan istana dan rumah-rumah para bangsawan. Orang-orang Tionghoa menguasai perdagangan berbagai jenis bahan baku pembuatan batik. Hingga tahun 1900-an, jumlah usaha pembuatan batik di seluruh Surakarta mencapai 369 buah.

Akhir abad ke-19 orang-orang Tionghoa tetap memainkan perannya. Orang-orang Tionghoa membentuk perkumpulan dagang yang bernama *Kong Sing*. Orang-orang Tionghoa memikat Samanhudi (pedagang batik terkemuka di Laweyan) untuk bergabung dengan *Kong Sing*. Revolusi Tiongkok pada Oktober 1911⁴¹ menyebabkan orang-orang Tionghoa mulai bersikap angkuh terhadap

⁴¹ Revolusi Tiongkok tersebut diprakarsai oleh Sun Yat-sen. Lihat Gondomono, *Manusia dan Kebudayaan Han*, (Jakarta: Kompas, 2013), hlm. 68.

orang Jawa dan memperlakukan anggota Jawa secara kurang layak.⁴² Samanhudi dan pengikutnya mengundurkan diri dan membentuk perhimpunan bernama *Rekso Roemekso*. Organisasi ini meningkatkan persaingan bahkan mengarah pada permusuhan dengan organisasi *Kong Sing*. *Rekso Roemekso* merupakan organisasi yang menjadi cikal bakal dari SDI (Sarekat Dagang Islam) yang kemudian berganti nama menjadi SI (Sarekat Islam).

V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kedatangan orang-orang Tionghoa di Surakarta berawal dari konflik internal Keraton Surakarta. Orang-orang Tionghoa merasa kecewa pada Paku Buwono II karena sikapnya yang berbalik mendukung VOC. Orang-orang Tionghoa melakukan pemberontakan terhadap Keraton Kartasura yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi. Peristiwa itu dikenal dengan geger pecinan 1742. Setelah geger pecinan berakhir, orang-orang Tionghoa diizinkan tinggal di Surakarta yaitu di Kampung Balong (sebelah utara Sungai Pepe) sekitar Pasar Gede.

Dalam konteks sosial, kehidupan orang Tionghoa di Surakarta pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan orang Tionghoa yang tinggal di kota-kota lain. Mereka menganut sistem kekerabatan bilineal, membentuk perhimpunan atau organisasi khusus Tionghoa berdasarkan suku, perhimpunan dagang, politik sosial, kematian, dan organisasi untuk memperjuangkan kepentingan mereka di Surakarta.

Dalam konteks ekonomi, orang-orang Tionghoa di Surakarta sejak awal sudah menjalin hubungan baik dengan orang Jawa, namun hubungan itu mengalami ketegangan yang berawal dari industri batik. Awal abad ke-20, orang-orang Tionghoa mendirikan perkumpulan dagang *Kong Sing*. Samanhudi, seorang pedagang batik terkemuka di Laweyan bergabung dengan *Kong Sing*. Revolusi Tiongkok 1911 menyebabkan orang-orang Tionghoa mulai bersikap angkuh terhadap orang Jawa dan memperlakukan orang Jawa secara kurang layak. Samanhudi dan pengikutnya mengundurkan diri dari *Kong Sing* dan mendirikan

⁴² *Ibid.*, hlm. 60.

Rekso Roemekso yang menjadi cikal bakal berdirinya SDI (Sarekat Dagang Islam) yang kemudian diganti namanya menjadi SI (Sarekat Islam).

Daftar Pustaka

Arsip

Regeering Almanak, 1908

Staatblad van Nederlandcsh Indie, 1835, No. 37

Staatblad van Nederlandsch Indie, 1891, No. 214

Volkstelling, 1930

Buku

Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia*, Yogyakarta: DIVA Press, 2014.

Alex Sudewa, *Dari Kartasura ke Surakarta*, Yogyakarta: Lembaga Studi Asia, 1995.

Ayu Windy Kinasih, *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*, Yogyakarta: Fisipol UGM, 2005.

Benny Juwono, "Etnis China di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi", *Lembaran Sejarah* Vol. 2, No. 1, Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM, 1999.

Brown, Colin, *A Short History of Indonesia*, Singapore: South Wind Productions, 2003.

Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*, Yogyakarta: Taman Siswa, 1989.

Djakariah, *Sejarah Indonesia II*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Frieda Amran, *Batavia: Kisah Kapten Woodes Rogers dan Dr. Strechler*, Jakarta: Kompas, 2012.

Gondomono, *Manusia dan Kebudayaan Han*, Jakarta: Kompas, 2013.

- Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Larson, George, D., *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Lay, Sie Tjoen, dkk., *Di Sekitar Sedjarah Indonesia-Tiongkok*, Bandung: KPPK Balai Pendidikan Guru, t.t.
- Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002.
- Lombard, Denys, *Nusa Jawa: Silang Budaya Bagian 2 Jaringan Asia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Nuraini Soyomukti, *Soekarno dan Cina*, Yogyakarta: Garasi, 2012.
- Pratiwo, *Arsitektur Tradisional Tionghoa dan Perkembangan Kota*, Yogyakarta: Ombak, 2010.
- Purcell, Victor, *The Chinese in South East Asia*, London: Oxford University Press, 1981.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- R.M. Ng. Tiknopranoto dan R. Mardisuwignyo, *Sejarah Kutha Sala: Kraton Sala, Bengawan Sala, Gunung Lawu*, Sala: Toko Buku Pelajar, 1980.
- R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- R.M. Sajid, *Babad Sala*, Surakarta: Rekso Pustoko, 2001.
- Rustopo, *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta (1895-1998)*, Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Sariyatun, *Usaha Batik Cina di Vorstenlanden Surakarta Awal Abad XX*, Surakarta: UNS Press, 2005.
- Suhartono, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Tim Kaprodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

W. D. Soekisman, *Masalah Cina di Indonesia*, Jakarta: Bangun Indah, 1975.

Windi Astuti, *Peran Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Bangun Indah, 2002.

Yusiu Liem, *Prasangka terhadap Orang-Orang Cina*, Jakarta: Jambatan, 2000.

Z. M. Hidajat, *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1993.

Skripsi

Bakti Syamsudin, “Eksistensi Etnis Tionghoa di Surakarta pada Masa Orde Lama 1945-1965”, *Skripsi*, Yogyakarta: FIS UNY, 2014.

Cahyo Adi Utomo, “Peran Etnis Cina dalam Perdagangan di Surakarta pada Tahun 1959-1998”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.

Eka Deasy Widyaningsih, “Masyarakat China Balong Sudiroprajan (Studi Interaksi Sosial Masyarakat China-Jawa di Surakarta pada Pertengahan Akhir Abad XX)”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2007.

Internet

<https://phesolo.wordpress.com/2012/02/25/pemukiman-tionghoa-di-surakarta-masa-kolonial/> (Diakses pada tanggal 28 April 2017, pukul 17:25).